Bab IV

Pergerakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Teori Solidaritas Kelompok Ibnu Khaldun

A. Amanat Dalam Pergerakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa laindan dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi menjadikan partisipasi rakyat mendapatkan ruang yang besar dalam perannya sebagai warga negara. Ini memiliki dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy)[1].

Partai politik menjadi wadah organisasi yang didalamnya terdapat bermacam bentuk aktifitas-aktifitas yang mencerminkan peran masyarakat sebagai warga negara.

[1] A. Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, Cet.I, 2007) 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solidaritas kelompok sebagai ikatan bagi manusia menjadi dasar penting bagi partai politik. Adanya kesamaan ide, tujuan dan cita-cita ini akan menghasilkan solidaritas kelompok yang kuat yang menjadikan bangsa Indonesia mampu melindungi segenap rakyatnya menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyatnya, melaksanakan keadilan sosial dan terjaminnya hak asasi rakyatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan yang bersumber pada hati nurani (*al-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*Al-amanah wa al-wafa u bi al-ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten dalam menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*), musyawarah dalam menyelesaikan persoalansosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

Konsekuensi dari peran serta masyarakat dalam membangun negara adalah adanya amanat dari rakyat sebagai wujud dari bangsa yang dicita-citakan, yakni terjaminnya hak asasi manusia yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan yang bersumber dari hati nurani yakni ide, tujuan, dan cita-cita yang menjadi dasar pondasi bagi tegaknya solidaritas kelompok.

Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau negara besar.[2] karena dengan dukungan solidaritas kelompok yang kuat, maka amanat tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kuatnya rasa solidaritas kelompok ini akan membuat partai politik mampu memecahkan rangkaian masalah sosial yang dihadapi. Dengan adanya kesatuan rasa dari para anggotanya, maka masing-masing akan memendam kepentingan pribadi demi menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Konsisten dalam menjalankan ketentuan yang telah disepakati menuntut kuatnya solidaritas kelompok. Segala konsekuensi yang mungkin timbul akan dengan rela ditanggung bersama dengan menggunakan jalan demokrasi di dalam musyawarah.

Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya yang meliputi terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan, perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-aql*),

[2] Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*,(Jakarta: UI Press, 2003) 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*), dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

Apabila partai telah memperoleh sebagian dari kekuasaan dengan bantuan solidaritas kelompoknya, maka partai akan memperoleh jalan untuk mendapatkan kenikmatannya.[3] Kenikmatan-kenikmatan ini diwujudkan melalui terpeliharanya jiwa, hak-hak dasar seperti pangan, papan, sandang (*hifdzu al-nafs*), terpeliharanya hak asasi dalam beragama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya kebebasan berpendapat (*hifdzu al-aql*), jaminan atas perlindungan masa depan (*hifdzu al-nasl*) dan keamanan harta benda (hifdzu al-mal). Dengan demikian setiap warga negara dapat menjalankan kewajibannya serta menerima haknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena kekuatan suatu organisasi berasal dari solidaritas dalam kelompoknya, maka ia pun kembali kepada kelompoknya. Namun apabila rasa solidaritas kelompoknya melemah, maka secara otomatis kekuatan dalam organisasi tersebut melemah. Kedaulatan yang telah diperoleh terkadang cenderung menjadikan anggotanya hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Pada saat inilah fanatisme pribadi muncul dan merusak ikatan solidaritas kelompok yang telah dibangun. Sehingga masing-masing

[3] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.IX, 2011), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi cenderung kepada golongan tertentu dan menjauhkan mereka dari tujuan semula.

B. Aplikasi Pancasila Dalam Pergerakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu memberikan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal itu tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan. Melainkan juga harus terrefleksikan dalam tubuh internal partai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu dasar negara akan kuat bila dasar tersebut berasal dari dan berakar pada diri bangsa yang bersangkutan[4]. Kedaulatan merupakan tujuan dari solidaritas kelompok. Apabaila kedaulatan telah berhasil dicapai, maka kekuasaan yang telah dimiliki harus kembali kepada kemaslahatan kelompok. Oleh karenanya, kebijaksanaan pemerintahan serta hubungan antara pemimpin dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan[5]. Musyawarah mufakat menjadi jalan untuk menyeimbangkan kontrol kekuasaan, dan ini dilaksanakan pada tingkat kekuasaan yang paling rendah sampai pada tingkat kekuasaan yang paling tinggi.

Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri di suatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian, masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh solidaritas kelompok suku. Negara yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.[6] Hal ini dikarenakan solidaritas kelompok itulah

[4]Suroto, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1984), 108.
[5]Munawir Syadzali, *Islam* ..., 102
[6] Ibid, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membuat orang menyatukan usaha untuk yujuan yang sama; mempertahankan diri, dan menolak musuh.[7]

Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa yang pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpihak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap menyeimbangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathariyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan, antara satu dengan lainnya.

Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan watak yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati nurani manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau diantara mereka mendapat perlakukan tidak adil atau hendak dihancurkan. Solidaritas kelompok menimbulkan hasrat untuk berbuat sesuatu, melindungi pihak yang terancam[8].

---

[7] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah, ...,* 166.
[8]Ibid, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan oleh segenap warga negara Indonesia. Para pemegang kekuasaan harus mampu menjadi contoh teladan bagi pengamalan Nilai-nilai Pancasila. Ini akan memperkuat solidaritas kelompok yang lebih besar, yakni ikatan keagamaan, ikatan kebangsaan, dan ikatan kemanusiaan. Mereka tidak akan rela apabila salah seorang dari warga negara Indonesia diperlakukan tidak adil, dan pemegang kekuasaan harus menjamin pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila.

C. Kekuasaan Dalam Pergerakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang diceritakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasi garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dan masyarakat yang telah terorganisasi, akan menemui situasi dimana mereka saling memperhatikan, yang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian mereka dapat memenuhi keperluan mereka[9]. Pemerintah memiliki tugas di dalam urusan agama dan kepemimpinan duniawi. Urusan agama ialah dengan kemampuannya sebagai seorang yang diperintah untuk menyampaikan kewajiban agama kepada masyarakat, serta berusaha untuk memobilisasikan mereka supaya melakukannya. Dan tugas pemimpin duniawi dengan kemampuannya sebagai seorang yang berusaha mengurusi kepentingan umum peradaban umat manusia. Bila kepentingan-kepentingan itu diremehkan, eksistensi manusia akan terancam. Solidaritas kelompok dan daya dorongnya cukup membuat jabatan-jabatan dalam pemerintahan bergerak melayani kepentingan umum. Bahkan ia akan lebih sempurna apabila ditegakkan berdasarkan agama.[10]

Oleh karenanya, kebijakan publik yang ditetapkan harus berlandaskan keadilan dan memperhatikan masyarakat minoritas. Karena itulah kekuasaan diberikan kepada mereka untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan

[9]Ibnu Khaldun, *Muqaddima*h,..., 228.
[10]Ibid, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

Amanat Tuhan yang diberikan kepada penguasa dimaksudkan untuk kemaslahatan warganya[11]. Ini menjadi landasan pokok bagi setiap kebijakan yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat. Aplikasi dari nilai kejujuran maupun keadilan tidak hanya terbatas pada lingkaran tertentu, melainkan mampu dirasakan oleh segenap warga negara.

Ketika umat manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan, dan ketika peradaban dunia telah menjadi kenyataan, umat manusia pun memerlukan seseorang yang akan melaksanakan kewibawaan dan akan memelihara mereka, karena permusuhan dan kezaliman adalah pula merupakan watak hewani yang dimiliki oleh manusia. Senjata yang dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesame manusia. Maka dengan sendirinya orang yang melaksanakan kewibawaan itu haruslah salah seorang di antara mereka sendiri. Ia harus menguasai mereka, dan mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka. Sehingga tak seorang pun di antara mereka sanggup menyerang lainnya. Dan inilah yang dinamakan kekuasaan, atau kedaulatan.[12]

Apabila penguasa tidak memiliki keahlian dalam menjalankan amanat, maka solidaritas kelompok yang telah dibangun akan rapuh. Akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang berujung pada perebutan

[11]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), 5 01.
[12] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan karena rakyat menghendaki penguasa yang berpihak kepadanya. Kedudukan sebagai penguasa adalah kedudukan yang terhormat, karena memberikan kepada pemegang kekuasaan segala kekayaan duniawi juga kepuasan lahir dan batin[13]. Ini menjadikan kekuasaan sebagai sasaran perebutan. Perebutan ini dikarenakan ketidakmampuan penguasa dalam menjalankan amanat kekuasaannya.

D. Simbol Agama Dalam Pergerakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*Insaniyah Diniyah)*, amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan, menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menuyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis.

Semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh satu anggota terhadap anggota lainnya, dan menuntun mereka ke arah kebenaran. Apabila perhatian telah terpusat kepada

[13]Ibnu Khaldun, *Muqaddimah,...,* 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran, maka tak ada sesuatupun yang menghalangi mereka, sebab pandangan mereka sama dan tujuan pun serupa dan satu, yang untuk itu mereka bersedia mati berjuang.

Apabila semangat agama mulai lemah dan rusak, sehingga agama tidak lagi memainkan peranan penting, maka kekuasaan dapat beralih kepada golongan yang lebih bersatu.[14]

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan, dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Agama adalah faktor penting yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Agama harus digandengkan dengan solidaritas kelompok, sehingga mampu memberi kontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik. Bila solidaritas kelompok menjadi prioritas bagi eksistensi suatu Negara, maka agama akan menjadi penopang kekuasaan Negara tersebut.[15] Agama dapat memperkokoh solidaritas kelompok dan menambah keampuhannya. Tetapi agama saja tidak dapat ditegakkan tanpa solidaritas kelompok. Motivasi agama saja tidak cukup kuat sebagai

[14]Ibid, 193
[15] Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik ...*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangkit perasaan senasib kalau tidak didukung oleh solidaritas kelompok yang bertumpu pada faktor-faktor lain non agama.[16]

Seorang penguasa agar dapat efektif dan mantap menjamin ketertiban negara dan keserasian hubungan antara para warga negara tidak mesti mendasarkan kelembagaan dan kebijakan pemerintahannya atas ajaran dan hukum agama yang diturunkan Tuhan, yang ditaati oleh rakyat karena keyakinan agama mereka. Kemampuan mengendalikan ketertiban negara dapat pula tercipta sebagai hasil dari besarnya wibawa kekuatan fisik yang memadai serta ketegasan dari penguasa. Sebagaimana yang dapat disaksikan pada sementara bangsa yang tidak memiliki kitab suci dan tidak terjangkau oleh dakwah-dakwah agama. Bentrokan antara sesama warga negara dapat dihindarkan semata-mata hanya karena kuatnya kesadaran rasional mereka bahwa berbuat sewenang-wenang terhadap sesama itu tidak dibenarkan karena akan berakibat pertentangan dan permusuhan.[17]

[16] Munawir Syadzali, *Islam* ..., 106.
[17] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id